

MEDIA DAN PENCERDASAN UMMAT DI TENGAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL YANG MENGANGA *)

Oleh Said Tuhuleley **)

IFTITAH

Muhammadiyah sebenarnya telah maju selangkah dalam konteks gagasan dakwah. Tajdid di bidang dakwah telah melahirkan konsep “dakwah kultural”. Akan tetapi penafsiran dakwah kultural lebih banyak sebatas dakwah dengan *mocopat*, wayang, bila perlu *labuhan*, dan sebagainya. Pendukung maupun penentang dakwah kultural sebenarnya terjebak dalam dataran perhatian yang sama, yah di sekitar pemanfaatan karya seni untuk dakwah.

Padahal dakwah kultural tentu bersentuhan juga dengan situasi kemanusiaan kita pada setiap kurun sejarah. Kita, misalnya, tidak lagi semata-mata hanya berpatokan pada adanya simbol-simbol budaya yang ada, tetapi lebih dari itu, dakwah kultural menuntut kita untuk membangun simbol kultural baru yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan sesuai untuk zamannya.

Dalam konteks ini, ketika salah satu persoalan utama masyarakat datang dari ketimpangan redistribusi sosial sebagai akibat dari meluasnya kapitalisme global yang berakibat bagi semakin tersingkirnya kaum miskin, maka dakwah kultural menuntut kita untuk memberi perhatian lebih pada soal-soal kemasyarakatan seperti itu.

Sehingga pada ketika kita membicarakan “Dakwah Pencerahan”, sebagai tema besar yang belakangan sering sekali menjadi bahan pengajian para pemimpin Muhammadiyah, menjadi keluar dari kerangka dakwah kultural kalau hal menarik itu dilepaskan dari persoalan-persoalan kemanusiaan dan realitas kemasyarakatan.

Hal yang sama terjadi pada pembicaraan tentang media dan pencerdasan ummat, kendatipun “media” dan “pencerdasan ummat” itu sesungguhnya merupakan dua atribut dari variabel yang berbeda; media mengacu pada sarana, sedangkan pencerdasan ummat mengacu pada usaha.

Makalah sederhana ini dimaksudkan untuk membicarakan media dan pencerdasan ummat di tengah realitas sosial yang dihadapi saat ini; kemiskinan dan kesenjangan sosial yang menganga. Pada bagian awal akan dibicarakan secara sederhana potret lembaga dakwah kita saat ini untuk kemudian masuk pada pembicaraan khusus tentang permasalahan yang kita hadapi dalam kitannya dengan realitas sosial, termasuk kesenjangan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sikap budaya masyarakat berhadapan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian spektakuler. Bagian akhir makalah ini berisi uraian sederhana yang berhubungan dengan pencerdasan ummat yang berkaitan dengan gerakan dakwah dalam konteks dakwah kultural.

Akan tetapi, karena kewaman penulis, makalah ini dibuat secara sangat sederhana bahkan bersahaja. Maaf untuk itu.

*) Disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kampus UMY, 3 Juli 2014.

**) Penulis adalah Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah; pernah bergelut di Majelis Tabligh PP Muhammadiyah selama dua periode; Ketua Dewan Direktur Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta; Staff Pengajar FAI UMY.

POTRET LEMBAGA DAKWAH KITA

Jika kita masuk pada pembicaraan tentang “gerakan dakwah” dalam arti organisasional, yang diperlukan adalah kalkulasi yang jujur terhadap apa yang telah dicapai saat ini, apa saja yang telah dilakukan, dan apa yang belum sama sekali di sentuh.

"Dienul haq Islam", dalam arti ajaran, serta "kuantitas ummat", menjadi kekuatan utama kita saat ini di bidang da'wah. Akan tetapi, kedua potensi besar ini jika dihadapkan pada 'wajah' da'wah Islamiyah saat ini akan memberikan gambaran yang cukup 'memilukan'. Pada ketika da'wah disoroti sebagai suatu proses teknis, akan kita temukan berbagai persoalan baru di sekitar gerakan da'wah (organisasional) tersebut.

Di dalam kenyataan, kendatipun terdapat peningkatan kuantitatif dari pusat-pusat/lembaga-lembaga da'wah, sementara upaya peningkatan kualitasnya pun mulai diusahakan, pelaksanaan da'wah Islamiyah di Indonesia sesungguhnya belumlah merupakan pencerminan dari suatu sistem gerak yang memadai. Cakupan kekuatan sistem yang dimiliki barulah pada dataran individual, itu pun dalam bobot yang sangat bervariasi.

Salah satu kelemahan, --jika dapat disebutkan demikian--, dari pelaksanaan da'wah Islam di Indonesia adalah tiadanya perencanaan yang tepat dan memadai yang didukung oleh pemahaman terhadap ummat dan permasalahannya. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa:

1. Terbatasnya sistem dokumentasi dan informasi, yang diakibatkan oleh ketiadaan tradisi penelitian pada pusat/lembaga da'wah. Keterbatasan ini menyebabkan banyak juga lembaga dakwah yang belum sepenuhnya memahami pokok persoalan yang dihadapi masyarakat kita dewasa ini.
2. Model pendekatan dan metode da'wah yang sering kurang tepat dan jauh dari kemungkinan 'pemecahan masalah', yang pada gilirannya justru menimbulkan permasalahan di kalangan ummat.
3. Media yang terbatas serta kurang mampu lagi 'berpacu dengan zaman'.
4. Kualitas da'i/muballigh yang kadang-kadang kurang sepadan dengan tugas yang harus diemban.

Selain itu, kelemahan di dalam organisasi da'wah merupakan persoalan tersendiri. Keadaan 'salah urus', sering menjadi ciri dari lembaga/organisasi da'wah yang kita miliki. Apatah lagi jika kita ingin bicara di sekitar gerak yang 'profesional'. Suatu sikap yang cenderung 'minimalistis' sering kita jumpai sehubungan dengan hal ini: "Ahh, da'wah itu tidak perlu direncanakan, toh selama ini sudah berjalan", atau "Media da'wah itu tidak perlu terlalu bagus, nanti malah enggak laku". Na'if!

Seperti demikian, maka ada satu hal yang pasti dan harus dilakukan jika kita ingin menjawab pertanyaan: "ke arah mana da'wah Islam?", yakni menempatkan juga jawaban strategis terhadap permasalahan "pengelolaan" da'wah sebagai bagian dari permasalahan da'wah itu sendiri. Dengan begitu, perbaikan terhadap empat corak kondisi problematis sebagaimana dijelaskan di atas menjadi arah gerak kita yang utama dalam kaitannya dengan perbaikan pengelolaan da'wah. Tentang arah gerak da'wah itu sendiri secara sederhana dan singkat diuraikan di dalam bagian berikut dari tulisan sederhana ini.

Sekarang kalkulasi minimal sudah kita lakukan, ditambah dengan gambaran permasalahan yang memperlihatkan betapa rumitnya medan da'wah yang sedang kita hadapi.

Sehubungan dengan ini, Islam memberikan kepada kita suatu nilai optimistis yang luar biasa, akan tetapi yang harus ditopang oleh nilai usaha dan kerja keras. Allah menjanjikan "subulana" bagi mereka yang berjuang di jalan-Nya (Q.S. Al Ankabut: 69), serta

memberi jaminan bagi "pertolongan" dan "peneguhan kedudukan" bagi mereka yang "menolong Agama-Nya" (Q.S. Muhammad: 7). Dan kita harus mulai!

Pertanyaan kemudian muncul, apa agenda mendesak untuk menjawab semua persoalan ini? Tentu tidak mudah bagi penulis yang awam untuk menjawabnya, tetapi guna meringkas bahasan, ada satu hal penting yang menjadi agenda strategis kita ke depan: "dalam kondisi seperti ini kita dituntut untuk mengamalkan secara sungguh-sungguh surat Al-Ma'un ini di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Diperlukan banyak sekali lembaga 'Penolong Kesengsaraan Oemoem'", sebagaimana dirintis oleh *Allahuyarham* K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu." Tentu saja masih harus ditambah dengan langkah-langkah strategis untuk menjawab empat persoalan yang mengitari lembaga dakwah kita.

GAMBARAN PERMASALAHAN

Gejala yang menarik di akhir abad XX dan awal abad XXI adalah semakin menipisnya batas-batas antarbangsa, dan semakin melemahnya faktor jarak sebagai salah satu unsur dalam hubungan antarmanusia. Semuanya ini tidak dapat dilepaskan dari percepatan kemajuan teknologi, khususnya telekomunikasi dan informasi, yang sedemikian tinggi dan mencengangkan. Futurolog terkenal, John Naisbit, bahkan menyebutnya secara pasti sebagai perubahan dari abad industri ke abad informasi. Di dalam bukunya "Global Paradox", Naisbit (1994) menulis,

"Sejak tahun 1876, ketika Alexander Graham Bell mengatakan kepada Watson, 'datanglah ke sini, saya menunggumu', yang memperlihatkan bahwa suara manusia dapat mengalahkan jarak, teknologi telah mendorong kita dalam suatu evolusi dari abad industri ke abad informasi. Bell dan asistennya yang kebingungan mungkin tidak pernah membayangkan dapat menjadi apakah telepon itu nantinya –sesuatu yang mengagumkan dari teknologi transmisi informasi dalam bentuk apa pun dengan kecepatan kilat ke mana saja di dunia—".

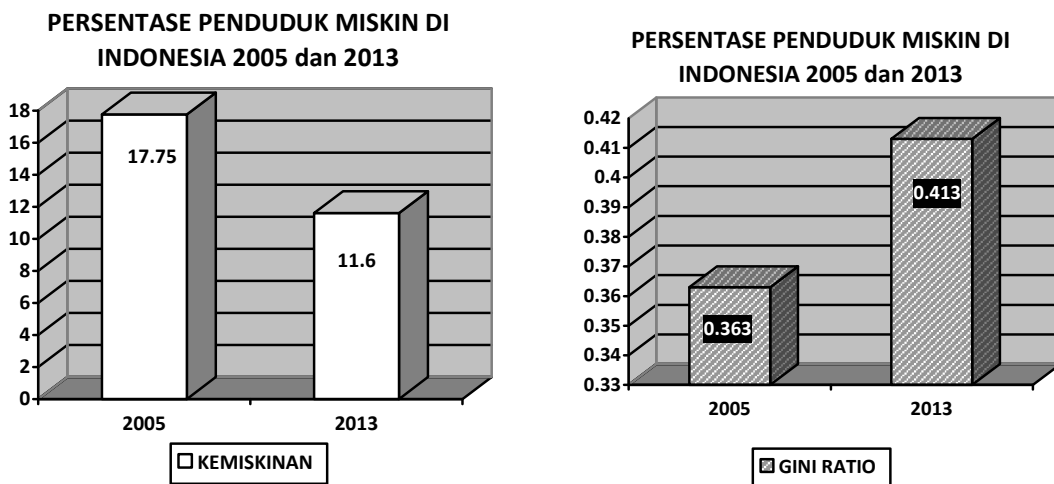
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dengan percepatan yang semakin tinggi telah menempatkan fenomena "kekalahan jarak dari suara manusia" sedemikian sehingga hubungan antarmanusia lewat sarana telekomunikasi dan informasi telah menjadi sangat cepat, meluas, dan "personal". Melalui telepon seluler, misalnya, seseorang dapat menghubungi relasinya kapan saja dan di mana saja relasinya itu berada, dan, lebih dari itu, pembicaraannya bisa menjadi sangat pribadi. Seorang direktur perusahaan dapat saja memperoleh informasi bisnis yang penting dari rekanannya di manca negara tanpa perlu repot-repot mengurus paspor, visa, izin ke luar, dan sebagainya.

Persoalannya ialah, siapa penikmat kemajuan ini? Siapa yang dapat dengan mudah memanfaatkan "kemewahan" teknologi komunikasi dan informasi awal abad XXI ini? Apakah seluruh lapisan masyarakat? Tiga pertanyaan ini mencuat berbarengan dengan kenyataan bahwa siapa yang mempunyai akses ke pusat informasi, serta siapa saja yang menguasai sumber informasi dan mampu menyebarkannya ke mana saja, ialah yang mampu mengendalikan perubahan.

Seperti demikian, maka kepesatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengandung, paling tidak, dua hal penting, yaitu, *pertama*, melahirkan peluang bagi hubungan antarmanusia yang lebih luas dan merdeka, *kedua*, menyempitkan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu memiliki prasarana komunikasi dan informasi canggih untuk

berkiprah lebih jauh. Kesenjangan pemilikan prasarana komunikasi dan informasi canggih – dan lebih jauh lagi kesenjangan di dalam penguasaan teknologi— pada dasarnya mengarah juga pada kesenjangan sosial. Dalam konteks ini dapat timbul dua kelompok sosial yang besar, yaitu, *pertama*, kelompok masyarakat yang memiliki dan memanfaatkan prasarana komunikasi dan informasi canggih dan dengan begitu mempunyai akses ke pusat-pusat informasi, serta *kedua*, kelompok masyarakat yang tidak mampu memiliki prasarana komunikasi dan informasi canggih dan dengan begitu tetap terpuruk dalam ketidakberdayaannya. Implikasi lanjut dari kecenderungan ini sudah barang tentu menjalar ke sektor-sektor kehidupan masyarakat yang lebih luas, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Timbulnya berbagai persoalan sosial di tanah air belakangan ini tampaknya tidak lepas dari kecenderungan sebagaimana secara sederhana digambarkan di atas. Semuanya kemudian melahirkan lingkaran setan yang tak putus-putusnya. Perhatikan bagaimana menurunnya tingkat kemiskinan secara signifikan, tetapi bersamaan dengan itu terjadi peningkatan gini ratio atau indeks ketimpangan distribusi pendapatan. Grafik berikut ini memperlihatkan hal tersebut.

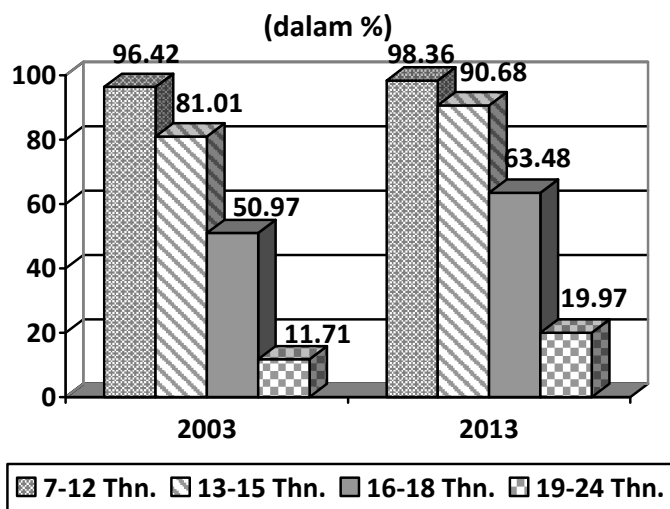


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Data di atas menjadi menarik untuk diperhatikan. Tingkat kemiskinan turun secara signifikan, dihitung dari rata-rata pendapatan perkapita. Akan tetapi bersamaan dengan itu terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tajam antara penduduk berpendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi. Keadaan ini memperlihatkan bahwa masyarakat termiskin itu kalah segala-galanya, termasuk kalah dalam akses informasi.

Kecenderungan yang hampir mirip terjadi juga dalam dunia pendidikan kita. Akibat pembangunan selama era reformasi ini dapat dilihat ada perbaikan dalam partisipasi sekolah anak Indonesia. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun ke tahun memperlihatkan hal yang cukup menghibur hati. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam grafik di halaman berikut.

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH 2003 dan 2013



Sumber: BPS RI, Susenas 2003-2013

Jika dilihat dari perkembangan APS 2003 ke 2013, memang menggembirakan. Sebab ada peningkatan APS di semua jenjang usia. Akan tetapi jika dilihat perkembangan APS masing-masing jenjang usia pada tahun yang sama, akan terlihat betapa masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari usia SMTP ke SMTA, dan dari usia SMTA ke PT.

Penyebab utama dari hal ini adalah ketiadaan biaya. Perhatikan saja bagaimana APS anak usia SD dan SMTP. Terlihat bahwa kebijakan pemerintah dengan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), cukup mampu menjamin anak usia SD melanjutkan ke SMTP. Diberikannya dana BOS tentu sangat mengurangi beban keluarga miskin yang ingin menyekolahkan anaknya.

MEMBANGUN KETAHANAN BUDAYA TERHADAP MEDIA

Sebagaimana disinggung di atas, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengalami percepatan yang semakin tinggi. Persoalannya, di samping kesenjangan penguasaan teknologi komunikasi dan informasi canggih, ada persoalan ikutan lain yang perlu dicermati secara lebih teliti, yaitu bahwa informasi yang disampaikan lewat media tidak sepenuhnya berupa hal-hal positif yang diperlukan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Justru banyak hal negatif seperti pornografi, tawaran hidup hedonistis, dipertontonkannya kekerasan secara telanjang, dan berbagai informasi sampah lainnya. Apalagi ditambah menjamurnya media sosial sepuluh tahun terakhir ini yang menerobos sampai ke dapur rumah kita.

Sehubungan dengan hal ini, Arnold Toynbee, sejarawan besar itu, secara pasti memperlihatkan suatu kontradiksi yang menarik antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kreativitas dalam bidang politik, ketika menjawab pertanyaan Daisaku Ikeda, pimpinan Soka Gakkai, organisasi kaum Budhis awam, tentang sistem demokrasi (dalam Ikeda & Toynbee, 1987). Toynbee berkata:

"Tingkat penampilan etis manusia masih rendah, dan belum juga meningkat. Tingkat penampilan teknologinya telah meningkat dengan grafik yang melonjak, yang telah

bergerak dengan kecepatan lebih tinggi dalam zaman kita sekarang dari zaman-zaman sebelumnya. Ini tidak hanya sesuatu yang memalukan, ini menimbulkan bahaya yang fatal".

Pernyataan Toynbee ini menarik, sebab salah satu contoh dari penambalan etis yang buruk itu adalah dipaksakannya suatu model kehidupan tertentu kepada orang lain dengan latar belakang kultur yang berbeda.

Toynbee juga mengingatkan kita tentang itu dalam teorinya yang sangat terkenal, "Teori Radiasi Budaya". Toynbee dalam teori tersebut menyebut empat langkah penetrasi budaya sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama, aspek budaya tak pernah masuk secara keseluruhan melainkan secara parsial sesuai dengan lapisan aspeknya. Contohnya kebudayaan Barat bila dipecah akan memiliki lapisan aspek dari yang terluar aspek teknologi, seni, etika, dan agama.

Kedua, kekuatan menembus suatu aspek budaya berbanding terbalik dengan nilai budaya. Aspek terluar yakni teknologi memiliki nilai budaya yang paling rendah sedangkan lapisan terdalam yakni agama memiliki nilai budaya paling tinggi. Teknologi baru akan mudah sekali diterima oleh suatu masyarakat tetapi agama baru akan sulit sekali untuk diterima. Ini karena teknologi sebagai lapisan terluar yang memiliki nilai budaya terendah memiliki nilai kegunaan praktis yang paling tinggi. Suatu masyarakat ketika menerima sebuah kebudayaan baru akan memilah-milah aspek budayanya sehingga mereka dapat menyaring mana nilai terluar dan mana nilai terdalam. India dan Jepang demikian. Mereka menerima teknologi Barat tapi agama tak dibiarkan masuk seperti halnya teknologi.

Ketiga, suatu aspek budaya akan membuka pintu bagi masuknya aspek budaya dari lapisan yang lebih dalam. Masuknya teknologi berupa televisi telah membuka jalan masuknya aspek seni pada masyarakat. Budaya Pop Barat yang berada pada lapisan kedua terluar (seni) masuk melalui teknologi tv dan radio.

Keempat, aspek budaya yang tidak berbahaya pada suatu masyarakat bisa jadi berbahaya pada masyarakat lain yang menerima budaya tersebut. Toynbee memberikan contoh tentang Nasionalisme. Nasionalisme sebagai sebuah ideologi yang baru berkembang di Eropa abad ke 19 sebagai akibat tumbuhnya negara-negara nasional yang berproses sejak abad ke 17, ketika masuk ke Timur, terutama Timur Tengah, menjadi sesuatu yang berbahaya karena Nasionalisme telah memecah belah jazirah Arab.

Teori Radiasi Budaya ini sesungguhnya menjadi peringatan bagi lembaga dakwah agar sedapat mungkin berusaha membangun ketahanan budaya ummat menghadapi derasnya arus informasi sampah yang menyeruak ke dalam rumah tiap orang.

Bagi masyarakat miskin persoalannya menjadi lebih sulit, karena tawaran hidup secara hedonistis datang hampir tiap hari lewat radio dan televisi. Sementara itu, informasi pengimbang tentang usaha-usaha kreatif dan produktif sangatlah kecil porsinya. Akibat yang mungkin timbul adalah keputusasaan melihat keadaan, sebab mimpi yang coba dibangun lewat televisi adalah mimpi hidup enak. Akan tetapi kemampuan untuk mengejar mimpi sangatlah terbatas. Dalam konteks ini, sangat tepat peringatan Toynbee, masuknya aspek budaya dari lapisan luar akan membuka jalan bagi masuknya aspek budaya dari lapisan terdalam, yaitu agama.

PENCERDASAN BANGSA: DIPERLUKAN SUATU PANDANGAN BARU

Seorang pakar pendidikan Indonesia terkemuka, Prof. Dr. Tilaar, pernah melontarkan gagasannya yang menarik tentang pedagogik transformatif. Perubahan sosial menurut

pandangan pedagogik tradisional melihat lembaga pendidikan sebagai salah satu struktur sosial dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu lembaga pendidikan, seperti sekolah, perlu disiapkan agar dapat berfungsi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Apabila lembaga sekolah tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, maka ia akan kehilangan fungsinya dan kemungkinan besar ditinggalkan masyarakat. Fungsi sekolah, dengan demikian, adalah mentransmisikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan kebudayaan pada saat itu, tidak menjadi aktor perubahan sosial itu sendiri (Tilaar, 2002: p. 5). Lebih jauh Prof. Tilaar menyebutkan, di dalam pedagogik tradisional, tempat individu adalah sebagai obyek perubahan sosial. Individu tersebut mempelajari peranan yang baru di dalam kehidupan sosial yang berubah. Sekolah adalah tempat yang memperoleh legitimasinya dari kehidupan masyarakat atau pemerintah yang memilikinya (Ibid: p. 5).

Sementara itu, perubahan sosial menurut pandangan pedagogik transformatif sangat jauh berbeda. Kalau pedagogik tradisional melihat individu sebagai mahluk yang pasif-reaktif, yang hanya berkembang karena pengaruh-pengaruh dari luar, termasuk pengaruh dari perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungannya, maka pedagogik transformatif berangkat dari asumsi bahwa manusia itu adalah "individu yang menjadi". Secara panjang lebar Prof. Tilaar menjelaskan pengertian individu yang menjadi" itu sebagai berikut:

"Apa artinya individu-yang-menjadi? Hal ini berarti seorang individu hanya dapat berkembang di dalam interaksinya dengan tatanan sosial budaya di mana dia hidup. Hal ini berarti adanya suatu pengakuan peran aktif partisipatif dari individu-yang-menjadi dalam tatanan kehidupan sosial dan kebudayaan. Individu bukanlah sekadar menerima nilai-nilai budaya yang datang dari luar, tetapi nilai-nilai tersebut hanya dapat dimilikinya melalui perannya yang aktif partisipatif di dalam aktivitas sosial budaya dalam lingkungannya" (Ibid: p.6).

Pandangan tentang perubahan sosial yang dikedepankan Prof. Tilaar, yang menempatkan manusia sebagai aktor perubahan, ternyata telah juga dikembangkan oleh seorang sosilog Muslim terkemuka, Ibn Khaldun. Di dalam bukunya yang sangat terkenal, "Muqaddimah", Ibn Khaldun secara menarik merentangkan hubungan kausalitas antara kebutuhan akan "makanan" dan "pertahanan diri" dengan keharusan mengembangkan organisasi kemasyarakatan. Ibn Khaldun menulis:

"Keharusan adanya organisasi kemasyarakatan manusia atau peradaban itu dapat diterangkan oleh kenyataan bahwa Allah SWT. telah menciptakan dan menyusun manusia itu menurut satu bentuk yang hanya dapat tumbuh dan mempertahankan hidupnya dengan bantuan makanan. Ia memberi petunjuk kepada manusia itu atas keperluan makan menurut watak dan memberi padanya kodrat kesanggupan untuk memperoleh makanan itu" (Ahmadie –penerjemah-, 1986 p: 71).

Ditambah dengan daya pikirnya, manusia atas dorongan kebutuhan makan dan pertahanan diri mampu mengembangkan tidak saja organisasi kemasyarakatan, akan tetapi berbagai peralatan untuk memperoleh makanan dan mempertahankan dirinya. Dengan daya pikirnya itu juga manusia kemudian mampu menemukan berbagai kelemahan dari organisasi kemasyarakatan maupun peralatannya dan sekaligus mampu juga mengembangkan alternatif yang lebih baik.

Penggunaan teknologi api, misalnya, pada kenyataannya menimbulkan juga berbagai dampak yang tidak kecil bagi manusia. Apakah dengan demikian teknologi api lalu ditinggalkan dan kembali kepada teknologi batu, atau teknologi api tetap digunakan dengan menerima begitu saja akibat-akibat buruknya bagi manusia? Ternyata, dengan daya pikirnya, nenek-moyang kita memilih alternatif lain, yakni tidak kembali kepada teknologi batu, tetapi mengembangkan teknologi api yang lebih baik lagi yang mampu mengatasi dampak negatifnya terhadap manusia.

Proses ini berjalan terus-menerus hingga saat ini, pada ketika sains dan teknologi sudah mencapai tingkatnya yang sedemikian maju. Prof. Dr. Iskandar Alisjahbana (1989), mantan Rektor ITB, menyebut proses ini sebagai "fenomena dialektika pada sains dan teknologi"; suatu fenomena yang berlaku untuk setiap kebudayaan manusia, yaitu "penyelesaian suatu persoalan akan selalu membawa bibit persoalan baru yang pada suatu waktu juga akan menjadi persoalan utama yang membutuhkan penyelesaian pula".

Sampai di sini kita dapat menarik benang merah antara pemikiran di seputar perubahan sosial yang menempatkan manusia sebagai aktor perubahan, baik yang disampaikan Prof. Tilaar, Ibn Khaldun, maupun Prof. Iskandar Alisjahbana.

Jika demikian, menghadapi tantangan masa depan yang timbul karena perubahan sosial yang semakin cepat, manusia macam apa yang diperlukan, serta pedagogik macam apa yang dapat membantu mengembangkan manusia seperti itu?

Bagaimana karakteristik pribadi inovatif untuk perubahan sosial dalam masyarakat modern itu? Evverett Hagen (dalam Tilaar, 2002), melihat pribadi inovatif itu dalam empat aspek sebagai berikut.

Pertama, sikap terhadap realitas. Pribadi inovatif bersikap menyelidiki dan manipulatif terhadap realitas, ngotot mencari sebab-sebab yang reguler mendasari gejala sosial dalam rangka mempengaruhi dan mengontrol gejala tersebut.

Kedua, persepsi terhadap peranan dalam masyarakat. Pribadi inovatif mengambil tanggung jawab pribadi terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi, dan sejalan dengan itu mencari solusi terbaik dan berusaha mengintroduksi perubahan.

Ketiga, gaya kepemimpinan. Pribadi inovatif memiliki keterbukaan dan toleransi terhadap bawahan dalam rangka menganjurkan orisinalitas dan sikap serta tindakan inovatif.

Keempat, tingkat kreativitas dan inovasi. Pribadi inovatif memberikan penghargaan pada keaslian dan kebaruan serta memotivasi rasa ingin tahu yang terus-menerus.

Persoalannya sekarang, pedagogik atau pendidikan macam apa yang dapat melahirkan pribadi inovatif itu? Dr. Sastraprateja, mantan Rektor Universitas Sanatadharma Yogyakarta, mengartikan istilah pemberdayaan atau *empowerment* dalam konteks pendidikan sebagai daya untuk berbuat (*power-to*), kekuatan bersama (*power-with*), dan kekuatan dari dalam (*power-within*). Sastraprateja secara menarik menjelaskan:

"...Power-to adalah kekuatan yang kreatif yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu..... Pendidikan juga merupakan usaha untuk membangun power-with, kekuatan bersama, yaitu agar peserta didik membangun solidaritas atas dasar komitmen pada tujuan yang sama dan pengertian pada tujuan yang sama dan pengertian yang sama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guna menciptakan kesejahteraan bersama..... Yang lebih penting lagi adalah bahwa pendidikan bertujuan membangun power-within, yaitu kekuatan spiritual yang ada dalam diri peserta didik." (dalam Said, dkk, ed., 2003, p 100).

Ketika pendidikan hanya terpaku pada salah satu di antara ketiga kekuatan yang disebutkan Sastraprteja di atas, maka yang lahir adalah ketidakseimbangan kodrati sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pada saat pendidikan hanya diarahkan bagi pengembangan *power-to*, misalnya, maka yang lahir adalah makhluk cerdas yang dapat berbuat apa saja tanpa memperdulikan apakah perbuatannya itu bermanfaat bagi sesamanya atau tidak. Begitu juga ketika pendidikan hanya ditujukan bagi pengembangan *power-with* semata-mata, maka yang dimunculkan adalah sekelompok manusia yang memang dapat bekerjasama, akan tapi sangat tidak produktif dan tidak membawa perubahan apa-apa ke arah kemajuan bersama. Hal yang sama terjadi ketika pendidikan lebih terpaku pada pengembangan *power-within*. Pada saat itu, pendidikan hanya akan melahirkan orang-orang shaleh secara spiritual, tapi tidak mampu membawa perbaikan bagi sesama; bahkan dalam tingkat tertentu dapat memunculkan manusia dengan ego agama yang berlebihan.

Persoalan menjadi lebih menarik kalau gagasan pedagogik transformatif dihubungkan dengan arus informasi sampah yang mengalir deras melalui media, baik cetak maupun elektronik. Informasi sampah menjadikan manusia hanya sebagai obyek bagi pemasaran informasi maupun produk industri. Menjadi sangat kontradiktif jika di satu sisi melalui lembaga pendidikan dikembangkan pedagogik transformatif, tapi pada saat yang sama ketahanan budaya masyarakat menghadapi media tidak dibangun secara baik. Memang, salah satu alur penguatan ketahanan budaya masyarakat adalah pendidikan sekolah. Akan tetapi, pengaruh media terhadap masyarakat menjadi sangat personal dan massif, sehingga sekolah semata-mata tidak cukup untuk keperluan besar dan strategis tersebut.

Oleh karena itu upaya pencerdasan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari usaha membangun ketahanan budaya masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, gerakan dakwah memainkan peranan penting, dengan catatan, dakwah harus bertumpu pada *tafaqquh fiddin* dan *tafaqquh finnas*; memahami ajaran Islam secara baik, sekaligus memahami manusia dan permasalahannya.

KHATIMAH

Dakwah untuk pencerahan manusia tidak lepas dari gagasan besar dakwah kultural, dengan pengertian dakwah kultural tidak sekadar dihubungkan dengan cabang kesenian tertentu, tetapi dihubungkan dengan penyelesaian persoalan kemanusiaan, termasuk kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Dalam konteks ini, dua simpul penting perlu diperhatikan. *Pertama*, salah satu arah dakwah ke depan adalah membangun ketahanan budaya menghadapi kemajuan yang spektakuler dari teknologi komunikasi dan informasi. Untuk hal ini, Teori Radiasi Budaya dari Arnold Toynbee menarik untuk dicermati. *Kedua*, gagasan pedagogik transformatif menjadi menarik untuk dikembangkan dalam rangka pencerdasan masyarakat. Kedua hal ini menjadi penting untuk dikembangkan secara simultan.

Wallahualam.

DAFTAR BACAAN

- Iskandar Alisyahbana. 1989. Memahami Fenomena Dialektika pada Teknologi. Dalam *INOVASI No. 5 Th. III*.
- Ibn Khaldun (terjemahan Ahmadie Thoha). 1986. *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Tuhuleley, Said, dkk (editor). 2003. *Masa Depan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Jendela dan LP3 UMY.